

## BHINDHARA DAN DAKWAH POLITIK KEPESANTRENAN (Analisis Terhadap Misi Dakwah *Bhindhara* Dalam Politik Praktis di Madura)

Mohammad Suhaidi<sup>1</sup>, Dedi Eko Riyadi HS<sup>2</sup>, Hasan Basri<sup>3</sup>, Syamsuri<sup>4</sup>, Ike Yuli Mestika Dewi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Dosen STKIP PGRI Sumenep

Email : [emsuhaidi27@gmail.com](mailto:emsuhaidi27@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen STAIM Tarate Sumenep

Email : [ekoriyadi.dedi@gmail.com](mailto:ekoriyadi.dedi@gmail.com)

<sup>3</sup>Dosen STKIP PGRI Sumenep

Email : [hasanbasrinurhasan@gmail.com](mailto:hasanbasrinurhasan@gmail.com)

<sup>4</sup>Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep

Email : [syamsuri.good@gmail.com](mailto:syamsuri.good@gmail.com)

<sup>5</sup>Dosen STKIP PGRI Sumenep

Email : [ikeyulimd@stkipgrisumenep.ac.id](mailto:ikeyulimd@stkipgrisumenep.ac.id)

### Abstrak

Keterlibatan politisi pesantren dalam pergulatan politik telah menjadi fenomena tersendiri dalam dinamika politik, terutama tingkat lokal. Santri bahkan tidak hanya memilih partai politik berbasis pesantren, melainkan juga telah berdiaspora ke sejumlah partai yang tak terbatas ideologi kepartaian. Mereka telah menjelma menjadi kekuatan baru dalam sejumlah parpol yang variatif dan eksistensi mereka tidak hanya sekedar menjadi penonton, tetapi telah mampu memerankan diri sebagai politisi mumpuni di tubuh parpol yangigeluti. Karena santri dimanapun ia beraktifitas sejatinya tidak lepas dari prinsip dasar kepesantrenan, yaitu untuk melakukan transformasi sosial yang berpihak terhadap kemaslahatan bersama, termasuk juga dalam dunia politik. Sebagai alumni pesantren, perilaku politik mereka tentu saja didasarkan pada misi untuk melakukan upaya menghidupkan nilai-nilai pesantren dalam politik yangigeluti. Inilah transformasi dakwah politik yang telah dihidupkan oleh kalangan politisi pesantren (*bhindhara*) dalam pergulatan politik di Madura.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), dengan beberapa model pengumpulan data, yang meliputi observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan metode dokumentasi. Penentuan populasi dan sampel ditetapkan menggunakan teknik *snow-ball* dan teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menggambarkan tentang kategori-kategori yang ditemukan dan muncul dari data yang ada.

Politisi pesantren telah melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan nilai-nilai pesantren di tubuh parpol yang menjadi kendaraannya, terutama dalam parpol-parpol yang tidak berbasis pesantren. Misi mengintegrasikan tradisi pesantren sebagai ruh kegiatan partai. Politisi pesantren tersebut dalam prakteknya, tidak hanya sekedar menjadikan parpol sebagai sarana merebut kekuasaan, tetapi juga dijadikan sebagai sarana untuk membumikan tradisi keagamaan sebagaimana yang telah dikembangkan oleh pesantren, seperti kegiatan tahlilan, membaca shalawat, *istighasah* maupun kegiatan yang ada hubungannya dengan tradisi *trurasiyah*..

**Kata Kunci : Bindhara, Dakwah Politik, Kepesantrenan**

### Abstract

*The involvement of pesantren politicians in the political struggle has become a distinct phenomenon in the dynamics of politics, especially at the local level. Santri (bhindhara) does*

*not even just choose a pesantren-based political party but they had also spread out to many parties whose party's ideology is not limited. They have been transformed into a new power in many varied political parties and their existence is not just a spectator, but able to portray themselves as a qualified politician in a political party they were involved*

*Santri wherever he is, he cannot be separated from the basic principle pesantren mission, namely to make social transformation in favor of the common good, as well as in the political world. As an alumnus of pesantren, their political behavior has to be based on a mission to make efforts to live the values of pesantren in the politics involved. This is the transformation of the mission political that has been raised by pesantren politicians (bhindhara) in the political struggle in Madura.*

*This research is a field research (field research), it also used some data model, which includes observation (interview), and documentation method. Determination of population and sample determined using snow-ball technique and content analysis technique (content analysis) used for description of existing categories and emerging from existing data.*

*Pesantren politicians have made various efforts to revive the values of pesantren political parties intern that become his vehicle, especially in parties that are not based pesantren. The mission of integrating pesantren tradition as the spirit of party activity. Pesantren politicians in practice, it is not only to make political parties as a means of seizing power, but also used as a means to ground religious traditions as developed by pesantren, such as "tahlilan", reading "shalawat", "istighasah" and activities other activities those were trurasiyah tradition.*

**Key word:** *Mission of Politik, Pesantren Values, Politic Party and Bhindhara*

## Pendahuluan

Eksistensi pesantren sebagai kekuatan moral dalam kehidupan masyarakat nusantara, tidak hanya telah menempatkan dirinya sebagai institusi pendidikan terbaik, tetapi juga mampu menjadi kekuatan budaya yang signifikan, termasuk di wilayah Madura. Hal itu telah direpresentasikan oleh keterlibatan alumni pesantren (*bhindhara*) dalam dinamika politik yang terjadi. Bahkan, pesantren telah mampu menjelma menjadi salah satu kekuatan politik cukup penting yang bisa menentukan arah politik di Madura, baik Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Dominasi pesantren dalam dinamika politik di Madura, telah melegitimasi prediksi tentang kebangkitan masyarakat pesantren dalam menguasai kekuasaan politik dalam semua lini kehidupan.

Bukan hanya dalam jabatan politik di legislatif dan eksekutif, tetapi dominasi santri juga dalam jabatan elit dalam partai politik yang beragam, bukan hanya aktif dalam partai berbasis Islam dan pesantren, tetapi juga telah merambah dalam partai nasionalis, seperti PDI-P, Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura dan lain sebagainya. Yang lebih menarik, PBB dan PKS juga menjadi bagian dari kendaraan politik di kalangan para *bhindhara*.

Sementara istilah *bhindhara* merupakan panggilan yang dilekatkan terhadap kalangan santri, terutama santri yang masih belajar di dalam pesantren. Tetapi, panggilan *bhindhara* juga kadang digunakan oleh masyarakat untuk memanggil terhadap seseorang yang sudah tidak lagi belajar di pesantren. Jadi, penggunaan istilah *bhindhara* itu sejatinya berlaku terhadap seseorang yang

menempa diri di dalam lingkungan pesantren. Salah satu pandangan yang menegaskan tentang penggunaan istilah *bhindhara* untuk seseorang yang sudah lulus dari pesantren, diungkapkan oleh A. Latif Wiyata ( 2002 : 49-50) dalam bukunya :

*Bhindhara* adalah orang-orang yang telah menamatkan pendidikan pondok pesantren sehingga mereka memiliki pengetahuan keagamaan. Dengan kata lain, pengetahuan religiusitas mereka masih belum setaraf kemampuan kiai, namun sudah melampaui para santri. Dalam kehidupan masyarakat Madura, biasanya seseorang *bhindhara* juga sering diperlakukan hampir seperti kiai sehingga banyak pula orang yang *nyabis* kepadanya.

*Bhindhara* pada hakikatnya merupakan produk asli pesantren yang telah digembleng dengan ilmu pengetahuan dan kemandirian yang diharapkan bisa memberikan kontribusi perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui transformasi yang telah diberikan dipundaknya ; sesuai dengan misi seorang *bhindhara*, yaitu untuk *li yundziru qaumahum idza' raja'uu ilaihim*. *Bhindhara* merupakan *human resource* yang dibentuk oleh pesantren dengan pengalaman yang kompleks, terutama dalam pemahaman keagamaan. Pesantren memiliki tiga fungsi utama, seperti ditulis oleh Nur Chatim Zaini (dalam Wahid – Nur Hidayat, 2004 : 5) , yaitu. *Pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir agama (*centre of*

*excellence*). *Kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya masyarakat (*human resource*). *Ketiga*, sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agen of deelopment*).

Dalam keterkaitan itu, *bhindhara* yang terlibat dalam politik secara substansial merupakan produk pesantren yang pada fungsi yang kedua, yaitu sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia, terutama di bidang politik. Keterlibatan *bhindhara* dalam politik praktis, sejatinya tidak bisa dilepaskan dari peran pesantren yang telah memberikan proses pendidikan yang multi disiplin, sehingga terbentuk SDM yang mumpuni, termasuk SDM politik yang tidak diragukan. Hal itu telah terbukti dengan nyata bahwa *bhindhara* telah aktif terlibat dalam setiap dinamika politik yang berkembang, terutama di Madura.

Kondisi tersebut menunjukkan tentang perilaku politik pesantren yang telah mampu berdiaspora ke sejumlah partai dan tidak lagi tersekat dalam partai-partai berbasis pesantren, sehingga menghilangkan asumsi bahwa santri hanya tersentral dalam partai-partai yang sebelumnya identik dengan partai-partai yang kerap kali menjadi rujukan para kiai pesantren, seperti PPP dan PKB. Apalagi, hasil Pemilu pertama era reformasi tahun 1999, telah menjadi momentum politik yang memberikan kesempatan terhadap beberapa partai Islam pada posisi yang menakjubkan, seperti PKB, PPP dan PAN. Bahkan, hasil Pemilu 1999, telah berhasil mengubah peta politik nasional. Menurut A. Malik

Haramain (2004: 5) bahwa Pemilihan Umum 1999 telah mengubah konfigurasi politik nasional. PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang dan diikuti oleh Partai Golkar, PPP, PKB dan PAN.

Apalagi di Madura, dua partai ini, diakui atau tidak, telah menjadi partai idola kalangan kiai pesantren. PPP dan PKB telah mampu memberikan keyakinan di kalangan kiai Pesantren di Madura sebagai partai, tempat aspirasi kalangan pesantren bisa diperjuangkan. Tidak heran, apabila elit-elit PPP dan PKB, dijabat oleh kalangan kiai pesantren yang kharismatis di Madura.

Sebagai partai yang didominasi oleh kalangan ulama pesantren, maka eksistensi PPP dan PKB menjadi sangat dominan di Madura. Salah satu indikatornya adalah terletak pada jabatan penting di eksekutif dan legislatif yang mampu dijabat oleh kader kedua partai ini. Di Kabupaten Sumenep, sejak Pemilu pasca reformasi jabatan Bupati dan Ketua DPRD di jabatan oleh kader PKB. Dan demikian pula halnya dengan Kabupaten Pamekasan, jabatan di dua instansi itu, juga dijabat oleh kader-kader kedua partai, walaupun PPP tetap menjadi yang paling dominan di Kabupaten Gerbangsalam ini.

Namun demikian, keterlibatan pesantren dalam dunia politik kekuasaan, ada yang menganggap sebagai bentuk lain orientasi pesantren, karena jabatan dan kekuasaan yang menjadi target politik, dianggap sebagai bentuk ketidakmandirian kalangan pesantren. Hal itu diungkapkan secara

kritis oleh Abdul Munir Mulkhan (2001 : 92) :

Seacara tak sengaja, dunia pesantren telah mengalami perubahan radikal terutama selama modernisasi pembangunan nasional pada masa pemerintahan Orde Baru. Telah lahir sosok baru pesantren yang seolah masih mencoba kukuh seperti “moyang”-nya tetapi sekaligus berada di dalam tubuh dan pikiran baru. Jika dulu pesantren diidentifikasi sebagai sosok mandiri dan wiraswasta (*interpreneur*) serta bebas dari ketergantungan dengan kekuasaan pemerintah, sejak beberapa dekade lalu amat sulit menemukan pribadi pesantren yang bebas dari orientasi “priyayi” yang bekerja menjual jasa kepada pemerintah untuk memperoleh “gaji”.

Dalam keterkaitan itu, pesantren dan kiai di Madura, secara otomatis menjadi nahkoda dominan kedua partai berbasis pesantren tersebut, sehingga mampu menjadi penentu dalam setiap dinamika politik yang berkembang di Madura. Dengan kekuatan kharisma ulama yang luar biasa, maka PPP dan PKB menjadi magnet bagi masyarakat, sehingga mendapatkan banyak dukungan besar dari kalangan akar rumput. Apalagi, dalam tradisi masyarakat Madura, patuh kepada kiai dan ulama merupakan sebuah keniscayaan. Kiai adalah teladan kehidupan karena telah mendapatkan predikat sebagai pewaris para Nabi, yang pada gilirannya menjadi rujukan dalam

semua hal, terutama yang berhubungan dengan masalah sosial keagamaan. Bahkan, di kalangan masyarakat Madura, telah muncul asumsi yang melegitimasi kekuatan kiai : “ *mun ta’ noro’ keyae, noro’ah sapa ( kalau tidak ikut kiai, mau ikut siapa)*).

Dengan asumsi tersebut, kepatuhan masyarakat terhadap kalangan kiai, menjadi sesuatu yang mutlak, karena kiai telah menjadi *role model* dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk mengikuti keyakinan politik yang dipilih oleh kiai. Maka, kemenangan PPP dan PKB di Madura, karena kiai dan ulama masih meyakini kedua partai tersebut sebagai sandaran politik, yang pada gilirannya diikuti oleh semua elemen masyarakat pengikut kiai, terutama kalangan santri yang banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari kiai.

Akan tetapi, akibat perubahan sosial kehidupan yang terus berjalan dinamis, kepatuhan terhadap kiai tidak sepenuhnya menjadi referensi masyarakat dalam berpolitik. Mengingat, telah banyak elemen masyarakat dan kalangan santri yang berani berbeda haluan politik dengan para kiai. PPP dan PKB, pada gilirannya tidak menjadi partai pilihan kalangan santri, karena argumentasi dan insting politik yang dimiliki, banyak kalangan santri yang memilih aktif dalam partai-partai yang tidak berbasis pesantren, seperti Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar dan lain sebagainya.

Keterlibatan kalangan santri politik dalam berbagai partai yang tidak berbasis pesantren, tentu saja menjadi bentuk baru politik santri, apalagi dunia politik memiliki standar moralnya sendiri, yang oleh sejumlah kalangan dianggap sangat paradoks. Sebab, moralitas politik berbeda dengan moralitas pesantren, sehingga keduanya menjadi dua wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, ketika santri terlibat langsung dalam dunia politik, apalagi memilih partai yang tidak berbasis pesantren, akan dihadapkan pada pilihan yang cukup rumit, antara mempertahankan moralitas pesantren dan berhadapan langsung dengan moralitas politik yang keras dan kasar.

Apabila, santri politik tidak mampu memberikan warna dengan nilai-nilai pesantren, sama saja ia telah kehilangan jati dirinya, karena telah berhasil ditaklukkan oleh moralitas politik yang sebenarnya “tak ada kawan yang abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan yang abadi”. Sementara moralitas pesantren lebih menekankan pada persahabatan abadi, kedamaian, kejujuran dan keadilan, tanpa melihat kepentingan, karena kepentingan yang diajarkan oleh pesantren adalah kemaslahatan bersama.

Dalam keterkaitan itu, di tengah euforia politik santri, muncul fenomena menarik berkaitan dengan perbedaan politik antara guru-murid (santri-kiai) yang sudah tidak lagi tabu. Santri mengambil jalan politik yang bertolak belakang kiai, pada gilirannya telah menjadi fakta dinamika politik santri hari

ini. Banyak santri politik yang kemudian memilih partai politik yang tidak berbasis pesantren dan notabene tidak ada hubungannya dengan jalan politik yang dipilih oleh sang guru (kiai). Akan tetapi, kalangan santri politik tersebut, memiliki cara pandang yang berbeda atas pilihan politiknya, karena mereka memiliki asumsi sendiri yang menjadi landasan dalam menentukan partai yang menjadi kendaraan politik mereka. Yang pasti, keterlibatan santri politik tersebut tetap membawa misi utama mentransformasi nilai-nilai pesantren dalam kegiatan politik yang dilakukan. Oleh karena itu, masalah yang akan dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini, dapat dirumuskan menjadi beberapa hal: 1) Bagaimana persepsi santri politik dalam memahami politik praktis yang digeluti? 2) Bagaimana bentuk internalisasi nilai-nilai pesantren sebagai agian dari dakwah politik dalam partai yang menjadi sarana politik kalangan *bhindhara*?

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), dengan beberapa model pengumpulan data, yang meliputi observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan metode dokumentasi. Penentuan populasi dan sampel ditetapkan sebagai narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *snow-ball*, yaitu penggalan data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh,

informasi “tidak berkualitas” lagi (Syamsuddin, 2007 : 75). Sementara, teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menggambarkan tentang kategori-kategori yang ditemukan dan muncul dari data yang ada sehingga dapat melahirkan analisis yang obyektif tentang upaya santri politik guna menginternalisasi nilai-nilai pesantren dalam dunia politik yang dilakukannya.

### **Politik *Bhindhara* Sebagai Dakwah Kemaslahatan**

Setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpolitik, karena pada hakikatnya merupakan makhluk politik, sehingga berpolitik merupakan sesuatu yang manusiawi dan tidak bisa dipisahkan dengan naluri manusia sebagai makhluk politik. Kiai dan santri juga memiliki hak yang sama untuk berpolitik dalam pemaknaan yang umum, karena politik secara substansial dapat dipahami sebagai sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita yang menjadi misi setiap manusia. Khusus pesantren, politik lebih dijadikan sebagai sarana untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat, agar tercipta tatanan kehidupan yang makmur dan berkeadilan serta untuk menjadi bagian dari sarana dakwah untuk menegakkan kalimat Allah. Hal itu misalnya diungkapkan oleh politisi berlatar belakang pesantren, Agus Husnul Yakin :  
Tujuan berpolitik itu untuk membangun dakwah dan *ukhuwah*,

tentu harus sesuai dengan kaidah yang sebenarnya, yaitu untuk kembali pada pesantren, terutama dalam rangka *li i'lali kalimatillah*. Nilai-nilai perjuangan dalam politik praktis itu meliputi sosial, asas manfaat kepada masyarakat sekitar maupun secara umum. Jadi, koridornya sangat jelas, antara yang hak dan yang batil (Wawancara, 15 September 2017).

Ungkapan itu tentu saja menjadi dasar perjuangan politik yang dilakukan oleh politisi PBB tersebut. Bahwa misi utama politik praktis yang dilakukan tidak lepas dari misi dakwah dan transformasi nilai-nilai ajaran agama yang ideal, yaitu untuk merahmati seluruh alam. Politik adalah sarana perjuangan untuk memastikan kebenaran dapat terbela dengan baik serta mengupayakan setiap kebatilan bisa dilawan, terutama kebatilan kebijakan yang dilakukan, sehingga politik bisa menjadi sarana yang efektif untuk melawan setiap kebatilan tersebut.

Politik dalam konteks itu, diletakkan sebagai sarana untuk melakukan dakwah dan perjuangan dengan target kemaslahatan umat, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Jadi, bukan hanya sekedar jalan mendapatkan kekuasaan yang bersifat pragmatis sebagaimana pemaknaan politik secara umum. Politik santri (Islam) lebih ditekankan pada upaya membangun kehidupan yang *rahmatan lil alamin*, sehingga kemaslahatan umat menjadi fokus dalam politik Islam.

Islam memahami persoalan politik bukan hanya sebagai persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan saja, atau terbatas pada persoalan politik struktural, tetapi juga termasuk menyangkut kulturisasi politik secara jelas dan luas. Politik tidak hanya dipahami sebagai perjuangan untuk menduduki atau memperoleh kekuasaan saja, lebih dari itu, ia juga meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat. Bangunan politik semacam ini harus didasarkan pada kaidah fiqh *tasharruf al-iman alaa al-raa'iyah manutuhun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat) (Patoni, 2007 :8).

Penekanan politik kalangan *bhindhara* sejatinya di dasarkan pada landasan moralitas pesantren yang kuat, sehingga kecenderungan politik yang dilakukan tampak berbeda dengan politik yang dilakukan dengan menafikan nilai-nilai moralitas. Sebab, politik kalangan *bhindhara* tidak hanya sekedar menguasai kekuasaan secara pragmatis, tetapi yang lebih prinsipil adalah menegakkan politik dengan moralitas yang sangat tinggi. Dengan kata lain, karakteristik kalangan *bhindhara* terletak pada upaya untuk membangun dunia politik yang bermartabat dan relevan dengan spirit Islam, sehingga politik moral menjadi landasannya. Dibandingkan politik praktis, kalangan politik *bhindhara*, lebih dekat pada politik moral yang substansial.

Baik politik moral maupun praktis, keduanya sama-sama bertujuan menentukan atau mempengaruhi posisi kekuasaan negara dan substansi kebijaksanaan publik. Tapi, bedanya ialah bahwa politik moral bertujuan menegaskan kebenaran posisi kekuasaan dan kebijaksanaan publik, sedang politik praktis bermaksud memenangkan posisi kekuasaan negara dan substansi kebijaksanaan publik, kemudian politik praktis bermaksud memenangkan posisi kekuasaan negara dan substansi kebijaksanaan negara bagi diri atau kelompok pelaku politik itu sendiri (Patoni, 2007 : 8).

### **Transformasi Dakwah Politik: Tahlil, Berzanji dan Ziyarah Kubur**

Keterlibatan santri politik di dalam partai yang tidak berbasis pesantren, di satu sisi merupakan kenyataan politik yang tidak dibendung. Dengan visi dan tujuan yang dimiliki, kalangan santri politik yang berada dalam partai politik non pesantren, telah menampakkan eksistensinya. Tidak sedikit, kalangan santri politik yang berhasil menjadi kekuatan penting dalam parpol tersebut serta tidak sedikit pula, santri politik yang berhasil menjadi anggota DPRD melalui partai politik yang tidak berbasis pesantren. Pilihan santri politik terhadap partai non pesantren tentu saja tidak bebas nilai, karena mereka juga memiliki argumentasi rasional terkait dengan pilihan berpartai tersebut. Misi dakwah

pesantren, bahkan menjadi agenda tersendiri di kalangan *bhindhara* tersebut, sehingga menjadi bagian dari kegiatan partai politik yang yakininya. Disinilah, ide pelestarian budaya pesantren, mulai dikembangkan di tubuh partai politik oleh kalangan *bhindhara*, bahkan dijadikan sebagai bagian dari keberhasilan kalangan *bhindhara* dalam membuktikan jati dirinya sebagai alumni pesantren.

Oleh karena itu, dalam memilih partai, kalangan *bhindhara* tidak hanya sekedar kebetulan, melainkan karena beberapa faktor yang substansial yang telah melandasi perjuangan mereka di dalam dunia politik praktis. Memberikan warna pesantren, adalah agenda perjuangan yang telah dilakukan oleh kalangan *bhindhara* tersebut.

*Pertama*, dakwah keislaman (kepesantrenan) yang lebih tepat sasaran. Hal itu dilakukan oleh santri politik yang memilih partai nasionalis sebagai kendaraan politiknya. Bagi santri politik semacam ini, aktif di partai non pesantren akan lebih nyata dalam memperjuangkan dakwah keislaman, apabila dibandingkan dengan aktif dalam partai berbasis pesantren yang notabene sudah cukup kuat masalah pemahaman keislamannya. Akan tetapi, aktif berjuang dalam partai non pesantren, akan lebih nyata dalam mengislamkan pihak-pihak yang perlu sentuhan ajaran Islam. Artinya, santri yang berpolitik dalam satu partai yang memang berbasis pesantren, dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak ada tantangan dakwah. Berbeda

halnya dengan santri politik yang aktif terlibat dalam partai non pesantren yang terdiri dari individu yang kurang memahami Islam dan ajaran pesantren, sehingga tantangan dakwah kepesantrenan menjadi teruji. Hal itu ditegaskan oleh A. Tirmidzi Mas'ud, ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumenep. Menurutny bahwa :

Bagi saya, justru merupakan keniscayaan santri itu harus menyebar ke semua lini. Kalau orang masuk di partai Islam, jelas enak sekali, karena sudah ngumpul sama orang Islamnya, ngumpul sama orang pesantrennya, ngumpul sama kiai, ngumpul sesama lora. Itu sudah biasa. Karena sudah bertemu dengan orang paham fikih dan paham agama. Tapi, Justru yang menjadi tantangan, apabila santri berkumpul di dalam partai nasionalis, yang disitu pengurusnya, konstituennya, orang-orangnya, yang jelas tidak berlatar belakang pesantren. Kemudian, bagaimana kita bisa “mengislamkan mereka” ala pesantren, atau dalam bahasa yang lebih keras, bagaimana bisa mengaswajakan mereka atau meng-NU-kan mereka.

Dalam konteks itu, keberadaan politisi *bhindhara* dalam partai nasionalis, lebih berperan untuk memberikan transformasi ajaran Islam secara perlahan, terutama bagi kalangan yang belum memahami sepenuhnya tentang misi ajaran Islam. Bahkan, upaya yang menjadi tujuan dari santri politik di atas,

mencoba melakukan proses internalisasi ajaran Islam, tanpa disadari oleh segenap elemen partai yang belum memahami makna ideal ajaran Islam. Kondisi semacam itu, bisa diibartkan sebagai upaya untuk melakukan islamisasi di tubuh partai yang tidak berbasis Islam. Yang diungkapkan oleh Tirmidzi di atas, tentu saja menggambarkan tentang upaya mengislamisasi sebuah parpol yang tidak berbasis Islam, sehingga ruang-ruang politik yang ada di dalamnya, secara perlahan harus mampu diberi ruh dengan nilai-nilai pesantren yang *genuine*.

*Kedua*, menghidupkan partai dengan kegiatan-kegiatan berbasis pesantren. Hal ini dilakukan di tubuh partai politik Islam maupun nasionalis yang dari aspek pemahaman keagamaan, diyakini memiliki perbedaan dengan pemahaman ala pesantren, terutama yang berkaitan dengan tradisi keagamaan yang dibumikan dalam kehidupan masyarakat pesantren, antara meliputi kegiatan tahlil, berzanji maupun, dan ziyarah kubur. Semua kegiatan tersebut, dibangun sebagai kultur baru sebuah partai politik. Sebab, kegiatan ziyarah kubur, tahlilan maupun membaca shalawatan, hanya lumrah dilakukan oleh masyarakat pesantren ( baca : tradisi ala warga NU). Akan tetapi, dengan keterlibatan santri politik dalam tersebut, tradisi keagamaan tersebut, dapat terinternalisasi menjadi salah satu kebiasaan yang terbangun dalam kegiatan partai. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang politisi

PKS Kabupaten Pamekasan, KH. Alanwari :

Sebelum saya masuk PKS, tidak pernah ada tahlilan bersama di PKS Pamekasan. Setelah saya masuk di PKS, ada tahlilan bersama dan diikuti oleh semua pengurus ranting. Sebelum saya masuk PKS, tidak ada berzanji bersama, tetapi sekarang sudah ada berzanji bersama (wawancara, 1 September 2017).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan santri politik di tubuh PKS telah mampu memberikan warna baru dalam kegiatan partai yang mungkin saja dianggap tabu. Sebab, kegiatan tahlil dan berzanji, merupakan kegiatan ritual keagamaan masyarakat pesantren dan kerkali-kali ditentang oleh pihak-pihak yang tidak sependapat, karena kegiatan tahlil dan berzanji dianggap sebagai *bid'ah*, sehingga oleh mereka dianggap tidak perlu dilaksanakan. Ketika PKS Pamekasan bertahlil dan ber-barzanji sebagaimana diakui oleh kader PKS tersebut, menjadi sangat jelas bahwa santri politik diakui ataupun tidak telah berhasil mempengaruhi kegiatan partai agar tradisi masyarakat pesantren juga bisa terbangun dengan baik.

Walaupun, kegiatan tersebut pada gilirannya memunculkan asumsi politis bahwa kegiatan berbau pesantren semacam itu, dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat eksistensi partai di tengah-tengah masyarakat muslim, khususnya di Madura yang notabene telah akrab dengan kegiatan-kegiatan

tersebut. Ketika sebuah partai nasionalis ataupun partai-partai lain yang tidak berbasis pesantren, melakukan kegiatan semua itu, sejatinya harus dijadikan sebagai terobosan positif yang dilakukan oleh kalangan santri politik dalam tubuh partai tersebut. Sebab, tanpa ide dan ikhtiar dari mereka, tradisi keagamaan ala warna NU ini, mustahil dapat menjadi ruh dalam sebuah partai yang tidak memiliki latar belakang pesantren. Kegiatan tahlilan dan membaca shalawat yang dilakukan oleh PKS memang sangat fenomenal terjadi dalam kegiatan partai yang disinyalir kurang respek dengan kegiatan masyarakat pesantren semacam itu, akan tetapi dengan adanya kemauan para politisi PKS untuk bersolawat dan bertahlil, sama saja dengan telah memberikan warna baru dalam visi partai. PKS telah mampu memahami tentang kondisi masyarakat Madura yang mayoritas santri, sehingga internalisasi nilai-nilai pesantren yang dibumikan dalam kegiatan politik partai.

*Ketiga*, membangun budaya *turasiyah* dalam kegiatan partai, yang dilakukan dengan cara menggelar lomba baca kitab kuning. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari budaya baru yang dilakukan oleh sebuah partai, terutama partai Islam yang secara ideologis tidak berbasis pesantren, seperti yang dilakukan oleh PKS. Kegiatan lomba ini, tentu saja menjadi cara baru sebuah partai dalam menghidupkan tradisi baca kitab kuning yang menjadi tradisi dalam keilmuan pesantren, sehingga pelaksanaan kegiatan ini, bisa menjadi bukti tentang

upaya menghidupkan kegiatan partai dengan tradisi dalam pesantren. Maka, keterlibatan santri politik dalam partai ini, telah mampu memberikan warna kepesantrenan dalam sebuah partai yang tidak berbasis pesantren. Kegiatan lomba baca kitab kuning tentu saja merupakan bagian dari upaya menghidupkan tradisi pesantren oleh partai yang kerap kali distempel kurang seirama dengan paradigma pemahaman keagamaan ala pesantren. Oleh karena itu, apapun motivasinya, kegiatan lomba baca kitab kuning tersebut, tetap menjadi terobosan positif dalam menjaga tradisi yang sudah terbangun sangat kuat dalam kehidupan pesantren, terutama yang dilakukan oleh partai-partai yang tidak berbasis pesantren.

Dalam konteks itu, gerakan politik para *bhindhara* dalam membumikan nilai-nilai pesantren di tubuh partai politik merupakan menunjukkan tentang bentuk lain dalam berpolitik. *Bhindhara* tetap memiliki karakteristik yang khas dalam membangun kultur politik yang berbasis nilai-nilai kesantrian, terutama yang berkaitan dengan semangat pelestarian budaya pesantren yang sejatinya menjadi sasaran dakwah masyarakat pesantren. Apalagi, pesantren memang dikenal telah mampu melaksanakan pelestarian budaya dengan baik dalam sepanjang zaman di nusantara. Menurut Abdurrahman Mas'ud (2004 :17):

Ide "pelestarian budaya" yang berkembang dalam komunitas santri adalah satu kenyataan yang benar meskipun para sarjana selama ini

bersikap acuh tak acuh. Pelestarian budaya lokal merupakan salah satu ciri menonjol dari budaya pesantren, dan bahkan selama ini tidak memperoleh apresiasi. Bahwa komunitas ini berada di garis depan untuk menjaga pendekatan tersebut dapat dilihat sejak masa Wali Songo.

### Kesimpulan

Keterlibatan santri dalam politik di sejumlah parpol telah melahirkan kondisi baru yang cukup positif. Misi dakwah ala pesantren tampak menjadi bagian dari perjuangan mereka dalam dunia politik. Keterlibatan mereka dalam parpol di luar parpol non pesantren, telah mampu memberikan jalan dakwah kepada mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai ajaran pesantren, terutama dalam aspek spritual keagamaan yang telah akrab dalam kehidupan pesantren.

Berdasarkan kajian di atas, setidaknya terdapat dua hal yang menjadi kesimpulan dalam kajian ini. *Pertama*, kalangan *bhindhara* memiliki persepsi yang sama dalam memandang politik, yaitu sebagai sarana perjuangan dan dakwah yang tetap merujuk terhadap kaidah-kaidah ajaran pesantren. Bahwa politik tidak hanya semata menjadi ajang perebutan kekuasaan yang pragmatis melainkan yang lebih substansial adalah memperjuangkan kemaslahatan masyarakat secara *kaffah*.

*Kedua*, kehadiran *bhindhara* di dalam parpol yang tidak berbasis pesantren, telah memunculkan pandangan positif, karena dalam prakteknya mereka telah mampu melakukan dakwah transformasi nilai-nilai pesantren yang *genuine* dalam kegiatan partai yang sebenarnya masih tabu dengan kegiatan-kegiatan ala pesantren. Akan tetapi, keterlibatan kalangan *bhindhara* dalam parpol

tersebut, pada gilirannya telah berhasil menghadirkan kegiatan parpol dari hanya sekedar aktivitas politik, melainkan juga telah berhasil diberi ruh dengan tradisi ala pesantren yang substansial.

### Daftar Pustaka

- Haramain, A. Malik. *Gusdur, Militer dan Politik*. Yogyakarta : LKiS, 2004
- Mas'ud, Abdurrahman. *Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS, 2004
- Mulkhan, Abdul Munir. *Kiai Presiden, Islam dan TNI d Tahun-tahun Penentuan*. Yogyakarta : UII Press, 2001
- Patoni, H. Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- Sanit, Arbi. *Reformasi Politik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1998
- Syamsuddin, Sahiron. editor, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadith* . Yogyakarta : Teras, 2007
- Wahid, Abdurrahman – Nur Hidayat, editor. *Persepektif Baru Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*. Surabaya Yayasan Tri Guna Bhakti, 2001
- Wiyata A. Latif. *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : LKiS 2002.